

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.2, No.1. hal.55-67

### **Analisis Faktor-faktor Penyebab Defisit Anggaran Penganggaran Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011-2014**

Oleh:

Anggia Ramadhan \*<sup>1</sup>) Nadia Ika Purnama<sup>2</sup>)

Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

[ramadhan.anggia@yahoo.com](mailto:ramadhan.anggia@yahoo.com)

#### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of revenue sharing, the realization of local revenue and regional expenditure on the APBD budget deficit in the Provincial Government of North Sumatra for the 2011-2014 fiscal year. This study uses secondary data from BPS and BAPPEDA North Sumatra. The population in this study is the Provincial Government Budget of North Sumatra for the 2011-2014 Budget Year. The method of analysis used in this research is multiple regression method. The results of this study indicate that the revenue-sharing and regional expenditure variables have a positive effect on the APBD budget deficit in the Provincial Government of North Sumatra, while the realization of regional revenue has a negative effect on the APBD budget deficit in the North Sumatra Provincial Government.*

**Keyword** : revenue sharing, the realization of local revenue, regional expenditure, budget deficit

#### **PENDAHULUAN**

Kewenangan fiskal yang besar di era desentralisasi sangat menentukan struktur anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah (APBD). Dari substansi sebuah APBD dapat dilihat upaya atau keseriusan suatu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, seberapa besar potensi penerimaan yang akan digali, ke arah mana belanja daerah itu difokuskan, atau dari mana defisit anggaran akan dibiayai. Pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berisi rencana pembangunan daerah tahunan yang disahkan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD merupakan satu produk kebijakan daerah yang strategis karena dalam APBD termuat rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun tertentu untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Untuk dapat membuat APBD yang terarah, Pemda harus memiliki rencana strategis (Renstra). Renstra disusun secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan. Dengan adanya sistem tersebut Pemda akan dapat mengukur kinerja keuangannya yang tercermin dalam APBD. Agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi terbesar dari beberapa provinsi yang ada disekawasan pulau Sumatera. Merupakan provinsi yang multietnis, multicultural, ditambah dengan potensi sumber daya alam yang kaya dan beragam. Kondisi dan situasi tersebut harusnya menjadikan Sumatera Utara menjadi salah satu barometer pembangunan nasional yang sangat harus untuk diperhitungkan. Namun pada kenyataannya pembangunan di Sumatera Utara tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun belakangan. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mengalami defisit anggaran antara tahun 2013-2014.

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.2, No.1. hal.55-67

Data tentang realisasi PAD Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2014 dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1. Realisasi PAD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2014**

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2011	3.472.896.647.230,00	3.578.462.081.779,94	103,04
2	2012	4.372.231.640.122,00	4.050.763.903.338,00	92,65
3	2013	5.525.557.845.610,00	4.091.285.888.816,07	74,04
4	2014	5.128.315.131.755,00	4.351.216.336.963,89	84,85

Sumber : APBD Pemprovsu

Selain menurunnya jumlah pendapatan dilihat dari PAD tahun 2011-2014, indikator lainnya yang menyebabkan terjadi defisit anggaran di Provinsi Sumatera Utara yaitu Hutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan dilihat dari tahun 2011 hingga 2013. Hasil audit BPK menyatakan bahwa kekurangan penyaluran bagi hasil pajak daerah ke Kabupaten/Kota dari tahun 2011 sampai tahun 2013 sebesar Rp. 2,2 Triliyun yang belum dibayarkan Pemerintah Provinsi ke Kabupaten atau Kota. Hal ini jelas bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Mendagri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Gubernur Tahun 2012 tentang Pedoman Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara. Data terkait hutang DBH Provinsi Sumatera Utara sampai Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel 1.2.

**Tabel 2. Hutang DBH sampai Tahun Anggaran 2013**

No	Uraian	Jumlah
1	Hutang Tahun Anggaran 2011	657.637.397.997,00
2	Hutan Tahun Anggaran 2012	680.864.503.861,16
3	Hutang Tahun Anggaran 2013	865.376.677.323,00
<b>Total</b>		<b>2.203.878.579.181,16</b>

Sumber : APBD Pemprovsu

Hasil audit BPK menyatakan bahwa kekurangan penyaluran bagi hasil pajak daerah ke Kabupaten/Kota dari tahun 2011 sampai tahun 2013 sebesar Rp. 2,2 Triliyun sesuai dengan data diatas merupakan jumlah yang belum dibayarkan Pemerintah Provinsi ke Kabupaten atau Kota. Hal ini jelas bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Mendagri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Gubernur Tahun 2012 tentang Pedoman Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## KAJIAN TEORI

### Anggaran

Herbert (1987) menjelaskan bahwa anggaran merupakan sebuah pernyataan keuangan secara tertulis yang dibuat oleh pemerintah dan terdiri atas sejumlah pendapatan yang dapat diantisipasi/diperkirakan akan diterima, program/kegiatan yang telah disetujui untuk dilaksanakan, disertai dengan alokasi belanja untuk menjalankan kegiatan tersebut dalam suatu periode tertentu.

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.2, No.1. hal.55-67

Menurut Herbert harus secara jelas menyatakan program/kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah (aktivitas), berapa besar biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut (belanja) dan dari mana saja sumber-sumber penerimaan negara untuk membiayainya (pendapatan). Ketiga unsur anggaran pemerintah inilah yang kemudian berkembang dalam proses penyusunan anggaran di periode-periode selanjutnya. Anggaran juga didefinisikan oleh Freeman dalam Nordiawan (2008) sebagai sebuah proses pengalokasian sumber daya yang terbatas ke dalam kebutuhan yang tidak terbatas untuk periode waktu tertentu. *Governmental Accounting Standard Board* (GASB) dalam Mutiantantri (2008) turut mendefinisikan anggaran (*budget*) sebagai rencana operasi keuangan yang terdiri atas usulan estimasi pengeluaran dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai pengeluaran tersebut dalam periode waktu tertentu.

### Penganggaran

Penganggaran (*budgeting*) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas (Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin: 2007). Mutiantantri (2008) menyatakan bahwa penganggaran sektor pemerintahan cukup kompleks dan tidak terlepas dari unsur politis. Kompleksitas ini merupakan muara dari sulitnya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan-keinginan yang tidak terbatas dan sangat beragam. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya adalah (1) demokratis, (2) adil, (3) transparan, (4) bermoral tinggi, (5) berhati-hati, (6) akuntabel, (7) memenuhi kriteria 3E; Efisien, efektif, dan ekonomis, (8) responsif.

### Defisit APBD

Menurut Rahardja dan Manurung (2004) defisit anggaran adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah ( $G > T$ ). Anggaran yang defisit ini biasanya ditempuh bila pemerintah ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini umumnya dilakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi. Definisi dari defisit anggaran menurut Samuelson dan Nordhaus adalah suatu anggaran dimana terjadi pengeluaran lebih besar dari pajak. Sedangkan menurut Dornbusch, Fischer dan Startz defisit anggaran adalah selisih antara jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah dan penerimaan dari pajak.

Ada dua kemungkinan jenis hubungan yang terjadi antara defisit anggaran dengan pertumbuhan uang. Pertama, dalam jangka pendek kenaikan defisit yang disebabkan karena kebijakan ekspansioner akan cenderung menaikkan suku bunga nominal dan riil. Jika Bank Sentral menjaga supaya suku bunga tidak naik, maka dilakukan tindakan dengan meningkatkan pertumbuhan uang. Kedua, pemerintah dengan sengaja menaikkan persediaan uang dengan maksud agar mendapat penerimaan pemerintah dalam jangka panjang (Efendi, 2009).

### Defisit Anggaran

Pengertian tentang defisit anggaran dalam teori ekonomi makro, dapat dipahami dari perekonomian tertutup. Dimana dalam perekonomian tertutup dengan adanya tindakan fiskal pemerintah. Masing-masing pengertian mempunyai arti ekonomis (dan implikasi makro) yang berbeda satu sama lain. Pengertian pertama adalah Defisit Konvensional Defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dengan total pendapatan termasuk hibah. Pengertian kedua adalah defisit moneter. Defisit moneter merupakan selisih antara total

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.2, No.1. hal.55-67

belanja pemerintah (di luar pembayaran pokok hutang) dengan total pendapatan (di luar penerimaan hutang). Pengertian ketiga adalah defisit operasional. Merupakan defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal. Sedangkan pengertian keempat adalah Defisit Primer, Merupakan selisih antara belanja (di luar pembayaran pokok dan bunga hutang) dengan total pendapatan.

Terjadinya defisit atau surplus anggaran ditandai dengan item penyeimbang baik dalam penerimaan maupun pengeluaran, sehingga akan terlihat terjadinya ketidakseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan. Berbagai konsep pengukuran defisit anggaran sangat tergantung dengan kriteria yang digunakan dan tujuan analisis. Biasanya pilihan konsep defisit yang tepat tergantung oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Jenis ketidakseimbangan yang terjadi, (2) Cakupan pemerintah (pemerintah pusat, konsolidasi pemerintah, dan sektor publik), (3) Metode akuntansi (*cash* dan *accrual basis*), (4) Status dari *contingent liabilities* (Simanjuntak, 2001).

### METODE

#### Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu jenis data yang di peroleh antara lain dari literatur, laporan, buku ataupun sumber data yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif.

Data kualitatif berupa data yang diperoleh dari literatur, laporan, ataupun buku-buku acuan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sedangkan data kuantitatif berupa data yang diperoleh dalam bentuk angka time series periode tahun Anggaran 2011-2014, yang kemudian dikalkulasikan menggunakan metode interpolasi data menggunakan aplikasi *evIEWS* 9 dalam bentuk triwulan, sehingga diperoleh data 16 series.

#### Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini mencakup tiga metode, yaitu: (1) studi literatur; (2) studi dokumen; dan (3) wawancara mendalam (*indepthinterview*).

#### Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah. Metode regresi berganda ini untuk mengetahui apakah variabel independen (Dana Bagi Hasil, realisasi Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Belanja Daerah) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (defisit APBD). Sehingga Model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \epsilon$$

#### Uji Kualitas Data

Dalam suatu penelitian, kesimpulan yang diambil akan sangat tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, karena itu ada dua konsep yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas data, yaitu : validitas dan reliabilitas. Menurut Sujoko Efferin (2008: 13) validasi data adalah "kebenaran" sebuah data, yaitu sejauh mana sebuah data secara akurat menggambarkan fenomena sosial yang dirujuk. Menurut Sujoko Efferin (2008) reliabilitas data adalah sejauh mana konsistensi kategorisasi data jika dilakukan oleh peneliti yang lain atau oleh peneliti yang sama dalam kejadian yang berbeda.

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.2, No.1. hal.55-67

### Pengujian Asumsi Klasik

Untuk dapat melakukan analisis regresi berganda perlu pengujian asumsi klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar datanya dapat bermakna dan bermanfaat. Uji Asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

### Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan melalui pengujian model regresi dan pengujian pengaruh parsial masing-masing variabel bebas. Pengujian model regresi dimaksudkan untuk menguji pengaruh secara simultan seluruh variabel bebas. Pengujian model regresi dilakukan dengan uji F, sedangkan pengujian pengaruh parsial dilakukan dengan uji t.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Uji Asumsi Klasik

Pengujian terhadap asumsi klasik yang dilakukan meliputi multikolinieritas, autokorelasi, normalitas, linieritas dan heteroskedastisitas. Semua pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan program *evIEWS 9*.

#### Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan VIF (*Variance Inflation Factors*).

**Tabel 3. Uji Multikolinieritas – metode *Variance Inflation Factors***

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.14E-06	167.7638	NA
DBH	1.55E-29	29.67732	2.279389
BD	2.10E-31	57.94332	3.279008
PAD	1.45E-30	150.4305	4.657080

Hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat pada tabel kolom Centered VIF. Nilai VIF untuk masing-masing variabel DBH, BD dan PAD yaitu 2,279389, 3,279008 dan 4,657080. Karena nilai VIF dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5 (banyak buku yang menyatakan tidak lebih dari 10, tapi ada juga yang menyatakan tidak lebih dari 5) maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada kedua variabel bebas tersebut.

#### Autokorelasi

Data yang digunakan untuk mengestimasi model regresi linier merupakan data time series maka diperlukan asumsi bebas autokorelasi. Hasil dari kedua model dalam jangka panjang dan jangka pendek adalah sebagai berikut.

**Tabel 4. Uji Autokorelasi – LM Test Breusch-Godfrey Serial Correlation LM**

F-statistic	6.316633	Prob. F(2,10)	0.2168
Obs*R-squared	8.929246	Prob. Chi-Square(2)	0.1115

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

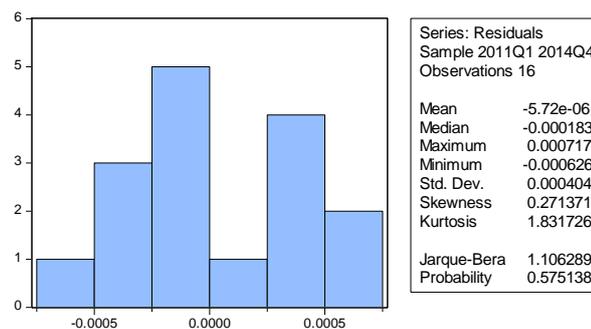
Vol.2, No.1. hal.55-67

Nilai Prob.  $F(2,11)$  sebesar 0,2405 dapat juga disebut sebagai nilai probabilitas  $F$  hitung. Nilai Prob.  $F$  hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) sehingga, berdasarkan uji hipotesis,  $H_0$  diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai Prob.  $F$  hitung lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi.

### Uji Normalitas

Untuk memastikan agar data terdistribusi normal, uji yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung koefisien Jarque-Bera. Dalam analisis ini uji dilakukan pada nilai residual dari tiap tiap persamaan regresi. Berikut adalah hasil ringkasannya.

**Gambar. 1. Hasil Uji Normalitas**



Dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nilai Prob. JB hitung sebesar 0,5751 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah dipenuhi.

### Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan yang linier, tetapi dalam pola yang berbeda juga dimungkinkan. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan *Test Breusch -Pagan-Godfrey*, *Test Glejser* dan *test Harvey*. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa nilai Prob.  $F_{hitung} >$  tingkat alpha 0,05 (5%).

**Tabel 5. Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey**

F-statistic	0.299136	Prob. F(3,12)	0.8254
Obs*R-squared	1.113286	Prob. Chi-Square(3)	0.7739
Scaled explained SS	0.316555	Prob. Chi-Square(3)	0.9569

**Tabel 6. Heteroskedasticity Test: Glejser**

F-statistic	0.154074	Prob. F(3,12)	0.9251
Obs*R-squared	0.593438	Prob. Chi-Square(3)	0.8979
Scaled explained SS	0.354517	Prob. Chi-Square(3)	0.9495

**Tabel 7. Heteroskedasticity Test: Harvey**

F-statistic	0.127032	Prob. F(3,12)	0.9423
Obs*R-squared	0.492488	Prob. Chi-Square(3)	0.9205
Scaled explained SS	0.535944	Prob. Chi-Square(3)	0.9109

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.2, No.1. hal.55-67

Nilai Prob. F hitung dalam ke tiga uji Heteroskedastisitas yaitu uji *Breusch -Pagan-Godfrey*, *Glejser* dan *Harvey* masing masing sebesar 0,8254, 0.9251 dan 0.9423 lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) sehingga, berdasarkan uji hipotesis,  $H_0$  diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas

### Uji Statistika

#### Uji t

Uji t dalam regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji apakah parameter (koefisien regresi dan konstanta) yang diduga untuk mengestimasi persamaan/model regresi linier berganda sudah merupakan parameter yang tepat atau belum. Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel. 8. Uji t-statistik**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.452643	0.001090	2.423963	0.0358
DBH	0.579965	2.97E-15	2.544751	0.0291
BD	0.269005	3.66E-16	2.688900	0.0227
PAD	-0.326846	9.49E-16	-3.114350	0.0110

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa:

1. Nilai prob. t hitung dari variabel bebas Dana Bagi Hasil ( $X_1$ ) sebesar 0.0291 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas Dana Bagi Hasil ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Defisit (Y) pada alpha 5% atau dengan kata lain, besar dana bagi hasil ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap defisit APBD pada taraf keyakinan 95%.
2. Nilai prob. t hitung dari variabel bebas Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ) sebesar 0.0110 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat defisit (Y) pada alpha 5% atau dengan kata lain, variabel bebas Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat defisit APBD pada taraf keyakinan 95%.
3. Nilai prob. t hitung dari variabel bebas belanja daerah ( $X_3$ ) sebesar 0.0227 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas belanja daerah ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat defisit (Y) pada alpha 5% atau dengan kata lain, variabel bebas belanja daerah ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat defisit APBD pada taraf keyakinan 95%.

#### Uji F (Kelayakan Model)

Uji F-statistik adalah pengujian model secara keseluruhan untuk menguji ketepatan model. Pengujian model ini melibatkan seluruh nilai koefisien secara bersama-sama dengan menggunakan distribusi F. Untuk lebih rinci, berikut adalah ringkasan hasil F hitung tiap tiap persamaan.

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.2, No.1. hal.55-67

**Tabel 9. Uji F- Statistik**

Sample: 2011Q1 2014Q4

Included observations: 16

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.452643	0.001090	2.423963	0.0358
DBH	0.579965	2.97E-15	2.544751	0.0291
BD	0.269005	3.66E-16	2.688900	0.0227
PAD	-0.326846	9.49E-16	-3.114350	0.0110
R-squared	0.858078	Mean dependent var		-5.72E-06
Adjusted R-squared	0.737117	S.D. dependent var		0.000404
S.E. of regression	0.000329	Akaike info criterion		-12.92179
Sum squared resid	1.08E-06	Schwarz criterion		-12.63207
Log likelihood	109.3744	Hannan-Quinn criter.		-12.90696
F-statistic	2.525684	Durbin-Watson stat		2.202453
Prob(F-statistic)	0.000031			

Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di atas. Nilai prob. F (Statistic) sebesar 0.000031 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Daerah (BD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variabel terikat Defisit (Def).

### Koefisien Determinasi R-squared (R<sup>2</sup>)

Nilai R-squared (R<sup>2</sup>) statistik mengukur tingkat keberhasilan model regresi yang digunakan dalam memprediksi nilai variabel terikat. Hasil koefisien determinasi dari regresi keempat persamaan adalah sebagai berikut.

**Tabel 10. Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>**

R-squared	0.858078	Mean dependent var	-5.72E-06
Adjusted R-squared	0.737117	S.D. dependent var	0.000404
S.E. of regression	0.000329	Akaike info criterion	-12.92179
Sum squared resid	1.08E-06	Schwarz criterion	-12.63207
Log likelihood	109.3744	Hannan-Quinn criter.	-12.90696
F-statistic	2.525684	Durbin-Watson stat	2.202453
Prob(F-statistic)	0.000031		

Artinya, nilai dana bagi hasil, belanja daerah dan pendapatan asli daerah memiliki proporsi pengaruh terhadap defisit APBD sebesar 85,81% sedangkan sisanya 14,19% (100% -85,81%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam model regresi.

### Pengaruh Nilai Dana Bagi Hasil Terhadap Defisit APBD

Koefisien regresi untuk variabel Dana Bagi Hasil ( $X_1$ ) sebesar 0.579965. Koefisien regresi Dana Bagi Hasil bernilai positif artinya pada kondisi dana bagi hasil meningkat, Defisit APBD juga akan mengalami peningkatan. Begitu pula pada saat persentase dana bagi hasil menurun, maka defisit APBD juga akan menurun. Kenaikan besar dana bagi hasil sebesar 1 persen akan meningkatkan nilai defisit APBD sebesar 0.579965 persen dan

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.2, No.1. hal.55-67

sebaliknya, penurunan dana bagi hasil sebesar 1 persen akan menurunkan nilai defisit APBD sebesar 0.579965 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap defisit APBD.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap defisit APBD**

Koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ) sebesar -0.326846. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah bernilai negatif artinya pada kondisi Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka Defisit APBD akan mengalami penurunan. Begitu pula pada saat persentase Pendapatan Asli Daerah menurun, maka defisit APBD akan mengalami peningkatan. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 persen akan menurunkan nilai defisit APBD sebesar 0.326846 persen dan sebaliknya, penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 persen akan meningkatkan nilai defisit APBD sebesar 0.326846 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap defisit APBD.

### **Pengaruh Belanja Daerah terhadap Defisit APBD**

Koefisien regresi untuk variabel Belanja Daerah ( $X_3$ ) sebesar -0.269005. Koefisien regresi Belanja Daerah bernilai positif artinya pada kondisi Belanja Daerah meningkat, maka Defisit APBD berpotensi mengalami kenaikan. Begitu pula pada saat persentase Belanja Daerah menurun, maka defisit APBD berpotensi mengalami penurunan. Kenaikan Belanja Daerah sebesar 1 persen berpotensi meningkatkan nilai defisit APBD sebesar 0.326846 persen dan sebaliknya, penurunan Belanja Daerah sebesar 1 persen berpotensi menurunkan nilai defisit APBD sebesar 0.269005 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap defisit APBD.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi Dana Bagi Hasil bernilai positif artinya pada kondisi dana bagi hasil meningkat, Defisit APBD juga akan mengalami peningkatan. Begitu pula pada saat persentase dana bagi hasil menurun, maka defisit APBD juga akan menurun. Kenaikan besar dana bagi hasil sebesar 1 persen akan meningkatkan nilai defisit APBD sebesar 0.579965 persen dan sebaliknya, penurunan dana bagi hasil sebesar 1 persen akan menurunkan nilai defisit APBD sebesar 0.579965 persen.
2. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah bernilai negatif artinya pada kondisi Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka Defisit APBD akan mengalami penurunan. Begitu pula pada saat persentase Pendapatan Asli Daerah menurun, maka defisit APBD akan mengalami peningkatan. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 persen akan menurunkan nilai defisit APBD sebesar 0.326846 persen dan sebaliknya, penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 persen akan meningkatkan nilai defisit APBD sebesar 0.326846 persen.
3. Koefisien regresi Belanja Daerah bernilai positif artinya pada kondisi Belanja Daerah meningkat, maka Defisit APBD berpotensi mengalami kenaikan. Begitu pula pada saat persentase Belanja Daerah menurun, maka defisit APBD berpotensi mengalami penurunan. Kenaikan Belanja Daerah sebesar 1 persen berpotensi meningkatkan nilai defisit APBD sebesar 0.326846 persen dan sebaliknya, penurunan Belanja Daerah

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.2, No.1. hal.55-67

sebesar 1 persen berpotensi menurunkan nilai defisit APBD sebesar 0.269005 persen.

### SARAN

Ada beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Walaupun dalam penelitian ini dana bagi hasil, pendapatan asli daerah dan belanja daerah memiliki hasil yang tidak sesuai hipotesis penulis, namun untuk mengamankan APBD, pemerintah harus tetap memperhatikan pemaksimalan realisasi APBD terkhusus ketiga variabel diatas yaitu dana bagi hasil, belanja daerah dan pendapatan asli daerah. Karena sekecil apapun signifikansinya APBD tetaplah bergantung pada ketiga variable diatas.
2. Memaksimalkan potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sehingga akan tercapai surplus APBD dan meminimalkan peningkatan defisit APBD dari tahun ke tahun.
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar dapat memperpanjang time series dalam model penelitiannya untuk menghasilkan data yang lebih signifikan.

### REFERENSI

- Arifin, Sjamsul. 1998. *Efektifitas Kebijakan Suku Bunga Dalam Rangka Stabilisasi Rate Di Masa Krisis*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Edisi Desember.
- Atmadja, Adwin S. 1999. *Inflasi di Indonesia, Sumber-sumber Penyebab dan Pengendaliannya*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 1 No 1: 54 . 67.
- Basri, Zainul Yuswar dan Mulyadi Subri, 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Rajawali Press, Jakarta.
- Batubara, Soulthan S. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada Departemen Pengadaan PT Inalum (Persero). *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 3(1), 40-58.
- Baswir, Revrison. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. BPFE, Yogyakarta.
- Baswir, Revrison. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. BPFE, Yogyakarta.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Boediono. 2001. *Ekonomi Makro, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*. Edisi Dua Puluh Satu. BPFE, Yogyakarta.
- Brixi, P.H. dan A. Mody. 2002. *Dealing with Government Fiscal Risk: An Overview*. Dalam *Government at Risk*, World Bank & Oxford University Press.Chalk, N., dan R. Hemming. 2000. *Assessing Fiscal Sustainability in Theory and Practice*. IMF working paper.
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Djojosoekarto, Agung, dkk. (2004). *Menjadi Wakil Rakyat dalam TataDemokrasi Baru*. Sekretariat Nasional ADEKSI-KAS, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Membangun Kapasitas FungsiPenganggaran DPRD*. Sekretariat Nasional ADEKSI-KAS, Jakarta.
- Djunedi, Praptono. 2008. *Naiknya Harga Minyak dan Antisipatif APBN*. Peneliti Badan Kebijaksanaan Fiskal. Majalah Warta Anggaran Nomor 9.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (terjemahan Drs Samodra Wibawa dkk.). Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye, Thomas R. (2002). *Understanding Public Policy (Tenth Edition)*. Prentice Hall, New Jersey.

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol.2, No.1. hal.55-67

- Efendi, Bakhtiar .2009. *Defisit Anggaran Pemerintah dan Infestasi Swasta di Indonesia*. FE USU, Medan.
- Endah, Agustina Wahyuningsih. 2010. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Defisit Anggaran Terhadap Investasi di Indonesia*. UNDIP, Semarang.
- Gujarati, N. Damodar. 2007. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. New York, Mc Graw Hill. Edisi 3. Erlangga Jakarta.
- Harahap, Diana S., Soulthan S.B. (2020). The Effect of Work Stress and Discipline on Employee Performance at Capella Multidana Company Medan. *International Journal of Eekonomic, Tecnology and Social Sciences (Injects)*. 1(1), 5-10.
- Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Herbert, Leo et al.. 1987. *Accounting and Control for Governmental and OtherNonbusiness Organizations*. McGraw Hill, Inc, New York.
- Jhingan. 2001. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Madura, Jeff .1993. *Financial Management*. Florida University Press, Florida.
- Mangkoeseobroto, Guritno. 1994. *Ekonomi Publik*. BPFE, Yogyakarta.
- Mankiw, N Gregory. 2003. *Makroekonomi*, Edisi Kelima. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, Andi. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Nordianwan, Deddi. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. 2004. *Teori ekonomi Makro : Suatu Pengantar*. Edisi Kedua. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sirojuzilam & Mahalli, Kasyful. 2010. *Regional: Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi*. USU Press, Medan.
- Shah, Anwar. 2007. *Local Budgeting*. The World Bank, Washington, DC.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Budgeting and Budgetary Institution*. The World Bank, Washington, DC
- \_\_\_\_\_. 2006. *Local Governance in Developing Country*. The World Bank: Washington, DC.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kedua. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Surjadi, A. J. 2006. *Antisipasi Dampak Negatif Tingginya Harga Minyak Dunia terhadap Stabilitas Perekonomian Nasional*. Makalah : Departemen Keuangan.
- Sulistoni, Gatot dan Hendriadi.(2004). *Anggaran Tak Sampai*. Somasi Ntb, Mataram.
- Triwibowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Penerbit LP3ES Indonesia, anggota IKAPI, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso. 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Fokusmedia, Bandung.
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selektu Manajemen Pemerintahan Daerah Edisi Revisi*. Fokusmedia, Bandung.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- World Bank. 1998. *Public Expenditure Management Hand Book*.Washington, DC
- Yin, Robert K. 2009. *Studi Kasus Desain & Metode Terjemahan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.